



LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021 ini dapat tersusun.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka atas penggunaan anggaran di tahun 2021.

Tujuan penyusunan dari Laporan Kinerja ini untuk memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target kinerja 5 tahun yang direncanakan sesuai dokumen Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Pada Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Sikka melakukan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang diikuti dengan Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yang memuat beberapa perubahan khususnya pada Indikator Kinerja Utama Bapelitbang Kabupaten Sikka yang lebih berorientasi hasil juga indikator-indikator kinerja yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja perangkat daerah.

Demikian laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat semakin ditingkatkan sehingga semakin bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka.

Maumere, 11 Pebruari 2022

Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka,



Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 adalah "TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023". Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui dua Misi Kabupaten Sikka, yaitu: (1) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas; (2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka ditetapkan 5 tujuan pembangunan dengan 9 indikator kinerja tujuan. Dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 10 sasaran pembangunan daerah dengan 20 indikator sasaran. Selanjutnya ditetapkan 8 strategi dan 29 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Dari hasil telaah terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tahun 2021 terdiri dari 1 tujuan dan 5 sasaran strategi dan 11 indikator kinerja tujuan dan sasaran, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

- o Tujuan 1 terdapat 5 sasaran strategi dan 10 indikator kinerja sasaran :
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (1) realisasi 70.72% atau tidak mencapai target 76.96%.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (2) realisasi 100% atau mencapai target 100%.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (3) realisasi 100% atau melampaui target 99.80%.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (4) realisasi 93.98% atau tidak mencapai target 100%.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (5) realisasi 30% atau tidak mencapai target 92%.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (6) realisasi 4.29% atau tidak mencapai target 22%.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (2), indikator kinerja (7) realisasi 89.60% atau mencapai target 85%.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (3), indikator kinerja (8) realisasi 100% atau mencapai target 100%.

- ✓ Capaian sasaran strategi (4), indikator kinerja (9) realisasi 91.85% atau melampaui target 78%.
- ✓ Capaian sasaran strategi (5), indikator kinerja (10) realisasi 1.43% atau melampaui target 0.37%.

Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Tahun 2021, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan strategis dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.9.815.287.451,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.9,810,285,451,- dan Belanja Modal sebesar Rp5.002.400,-.

Pada akhir Tahun Anggaran 2021, total realisasi Belanja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah sebesar Rp8.478.001.125,- atau 86,38% yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.478.001.125,- atau 86,38% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp0,- atau 0%.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mengalami berbagai macam hambatan/kendala. Hambatan/kendala tersebut antara lain (1) Jumlah pegawai yang masih kurang; (2) Masih rendahnya kualitas pelayanan; (3) Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas SDM perencana; dan (4) Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi (TI), (5) Mewabahnya virus covid19 juga mempengaruhi perencanaan yang berdampak pada realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan bencana covid 19 di Kabupaten Sikka. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka telah mengajukan usulan penambahan pegawai, penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Diklat dan Bimtek bagi ASN di tahun 2022. Melalui upaya tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin meningkat.

Maumere, 11 Pebruari 2022

Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka,



Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	1
1.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	1
1.2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	9
1.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana	11
1.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	14
2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	14
2.1.1. Visi	14
2.1.2. Misi	14
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	15
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	19
2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	19
2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	22
3.1.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)	25
3.1.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 Indikator (7)	28
3.1.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran 3 Indikator (8)	29
3.1.4. Pengukuran Pencapaian Sasaran 4 Indikator (9)	31
3.1.5. Pengukuran Pencapaian Sasaran 5 Indikator (10).....	32
3.2. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	35
3.2.1. Pendapatan	35
3.2.2. Belanja Pegawai	36
3.2.3. Belanja Barang dan Jasa	36

	3.2.4. Belanja Modal	38
Bab IV	Penutup	39
	4.1. Kesimpulan	39
	a. Capaian Indikator Kinerja	39
	b. Realisasi Anggaran	40
	4.2. Saran dan Rekomendasi	40
Lampiran	42
1.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021	43
2.	Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021	44
3.	Rencana Aksi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021	45
4.	Realisasi Rencana Aksi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021	57
5.	Monev Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2020	68

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Status Kepegawaian Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	9
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	9
Tabel 1.3	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	10
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	10
Tabel 1.5	ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan	11
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021	20
Tabel 2.4	Program/Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021	21
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021	22
Tabel 3.2	Perbandingan Pencapaian Kinerja pada sasaran Tahun 2019, 2020 dan capaian tahun 2021	24
	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Renstra :	
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)	25
Tabel 3.4	Capaian Anggaran Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)	26
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator (7)	28
Tabel 3.6	Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator (7)	28
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator (8)	29
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Sasaran 3 Indikator (8)	29
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator (9)	31
Tabel 3.10	Capaian Anggaran Sasaran 4 Indikator (9)	31
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran 5 Indikator (10)	33
Tabel 3.12	Capaian Anggaran Sasaran 5 Indikator (10)	33
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka Tahun Anggaran 2021.....	36
Tabel 3.14	Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka Tahun Anggaran 2021	37
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Badan Perencanaan dn Litbang Kab.Sikka Tahun Anggaran 2021	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah yang dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

Sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsi dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Untuk itu Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka akan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2021 dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

1.2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan dan Litbang) Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perekonomian;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 3. Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
 2. Sub Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman; dan
 3. Sub Bidang Kewilayahan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre, terdiri dari :
 1. Kepala UPT; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
4. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
5. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
7. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

8. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. pengkajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
11. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
15. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;

9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Keuangan dan Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten;
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum, Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman, dan

Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
12. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
13. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah; dan
14. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
15. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

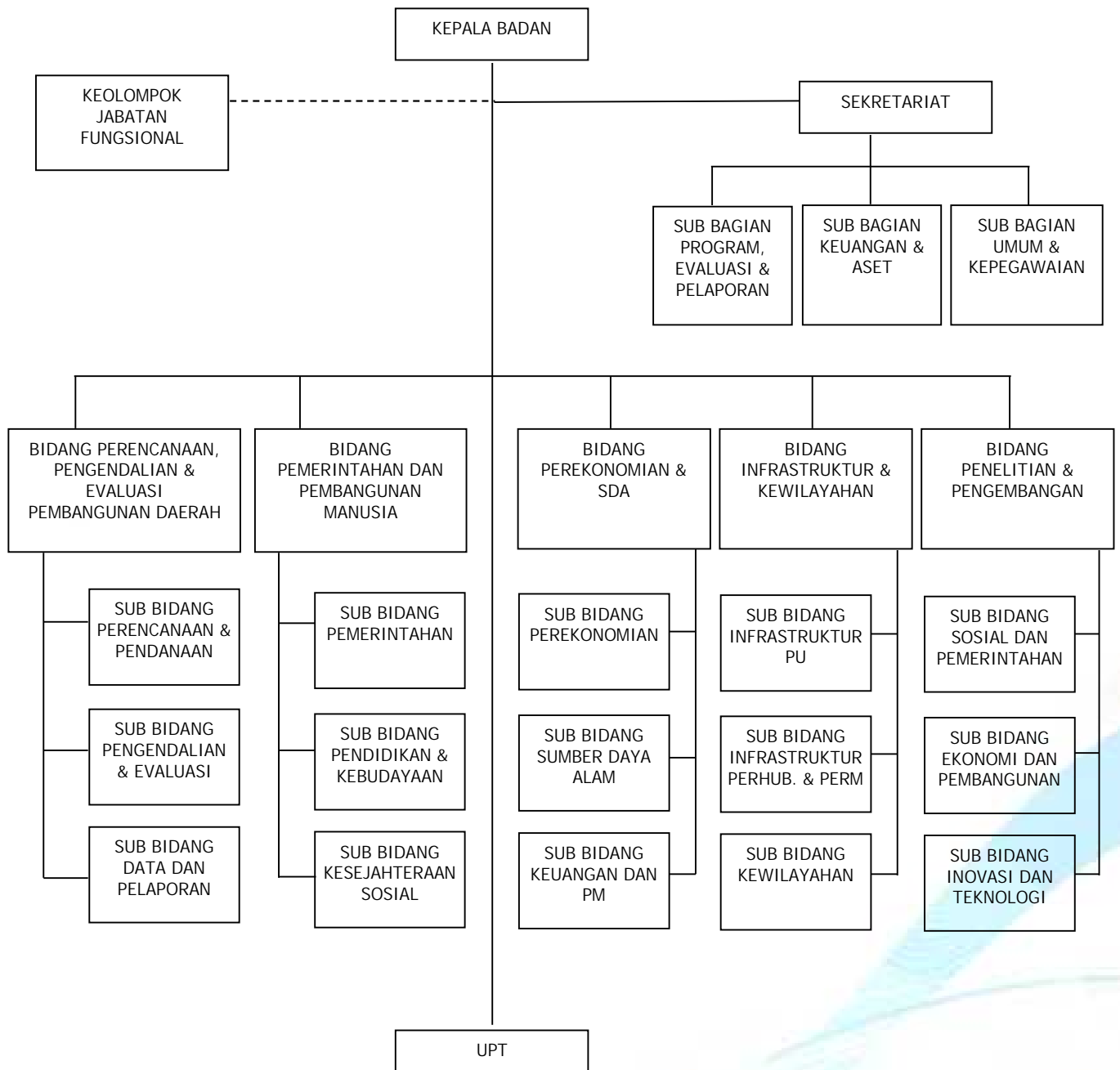
1. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. UPT Sikka Inovation Centre dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang terdiri atas manajemen kekayaan intelektual, inkubasi dan alih teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Sikka Inovation Centre mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Kebutuhan Anggaran dan Perlengkapan guna disampaikan kepada Kepala Badan;
2. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kepada Kepala Badan;
3. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan percepatan keberhasilan pengembangan bisnis bagi masyarakat;
4. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual yang meliputi perencanaan pengembangan dan perlindungan produk;
5. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka



1.2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berjumlah 51 (lima puluh satu) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Status Kepegawaian Badan Perencanaan dan Litbang
Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	ASN	21	14	35
2.	Honor	16	3	19
	Jumlah	37	17	54

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 65% pegawai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 35% adalah tenaga honor. Dari 19 tenaga honor tersebut terdapat 3 orang tenaga ahli yang menangani urusan sistem informasi dan teknologi dan 8 orang honorer yang ditempatkan untuk pelayanan administrasi pada kantor Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dan 8 orang tenaga honor ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre (SIC). Jika diperhatikan dari komposisi jenis kelamin, sebanyak 69% adalah laki-laki dan 31% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan agar dapat berkinerja secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya maka, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Jumlah ASN sebanyak 35 (tiga puluh lima) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Tingkat Pendidikan ASN Badan Perencanaan dan Litbang
Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SMA	4
2.	DIII	3
3.	DIV	1
4.	S1	21
5.	S2	6
	Jumlah	35

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari data tersebut diatas 17% ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah berpendidikan Strata Dua (S-2), diikuti 60% berpendidikan Strata Satu (S-1), 3% berpendidikan Diploma IV, 8% berpendidikan Diploma III, dan 12% berpendidikan SMA.

Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama/IV e	-
2.	Pembina Utama Madya/IV d	-
3.	Pembina Utama Muda/IV c	1
4.	Pembina Tingkat I/IV b	1
5.	Pembina/IV a	4
6.	Penata Tingkat I/III d	10
7.	Penata/III c	8
8.	Penata Muda Tingkat I/III b	3
9.	Penata Muda/III a	3
10.	Pengatur Tingkat I /II d	3
11.	Pengatur/II c	1
12.	Pengatur Muda Tingkat I/II b	1
13.	Pengatur Muda/II a	-
	Jumlah	35

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa 3% ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki Pangkat Pembina Utama Muda/IVc, 3% memiliki Pangkat Pembina Utama Muda/IVb, diikuti 11% memiliki pangkat Pembina/IVa, 29% memiliki pangkat Penata Tingkat I/III d, 23% memiliki Pangkat Penata/IIIc, 9% memiliki Pangkat Penata Muda Tingkat I/IIIb, 9% memiliki Pangkat Penata Muda/IIIa, 9% ASN Pengatur Tingkat I/II d selanjutnya terdapat 3% memiliki Pangkat Pengatur/IIc dan Pangkat Pengatur Muda Tingkat I/IIb.

Jika digambarkan sebaran ASN pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menurut golongan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	4	4	1	9
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	6	-	6
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	3	2	5

5	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	3	1	4
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	3	1	4
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	3	1	4
8	UPT Sikka Inovation Centre (SIC)	-	-	2	-	2
	Jumlah					35

Sumber: Hasil Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 1.5.
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	1
2.	PIM III	3	3
3.	PIM IV	5	23
	Jumlah	8	27

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari data tersebut diatas sebanyak 3 orang ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka telah mengikuti Diklat PIM III dan 5 orang telah mengikuti Diklat PIM IV, sementara yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1 orang, Diklat PIM III 3 orang dan Diklat PIM IV sebanyak 23 orang.

1.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No.	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	12 Ruang
2	Ruang Rapat	3 Ruang
3	Ruang Produksi	2 Ruang
4	Mesin Produksi	29 Unit
5	Kendaraan Roda 4	2 Unit
6	Kendaraan Roda 2	19 Unit
7	Speedboat	1 Unit
8	Televisi	2 Unit
9	AC	15 Unit
10	Komputer PC	9 Unit
11	Printer	30 Unit
12	LCD Proyektor	5 Unit
13	Laptop	29 Unit
14	Plotter	1 Unit

15	GPS	4 Unit
16	Kamera	1 Unit
17	Handycam	1 Unit
18	Mesin Potong Rumput	1 Unit
19	Mesin Generator	1 Unit
20	Mesin Produksi	28 Unit
21	Brankas	1 Unit
22	Microphone (Wireless Mic, floor stand, table stand)	19 unit
23	Soundsyatem	1 paket
24	Lemari Es/freezer	5 unit

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini memiliki 1 kompleks perkantoran dan 2 unit pengelola mesin produksi. Ruang kerja Kantor Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama dan bangunan pasca gempa bumi. Hasil kajian Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Bangunan Perkantoran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebesar 1,43. Ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana bangunan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang ada sesuai dengan jumlah dan jenis kualifikasi namun belum memadai.

1.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Kekuatan :

Ada beberapa faktor pendukung yang dinilai sebagai kekuatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

 - a. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
 - b. Adanya komitmen;
 - c. Adanya anggaran.
2. Kelemahan :

Ada beberapa faktor penghambat yang dinilai sebagai kelemahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

 - a. Jumlah pegawai yang masih kurang;
 - b. Masih
 - c. rendahnya kualitas pelayanan;
 - d. Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas SDM perencana;

- e. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi (TI);
- 3. Tantangan :
Ada beberapa faktor penghambat yang dinilai sebagai tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan dari tingkat basis;
 - b. Ego sektor;
 - c. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan realisasi rencana;
 - d. Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks.
- 4. Peluang :
Ada beberapa faktor pendukung yang diharapkan jadi peluang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - b. Adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - c. Semakin tingginya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan umum organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Sub bahasan mencakup Latar Belakang Penyusunan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

2.1.1. Visi

Visi adalah pernyataan cita-cita atau impian akan sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang diinginkan adalah kondisi akhir periode yang harus dapat diukur pencapaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha pembangunan yang dilakukan pada umumnya bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Kabupaten Sikka melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menuju kehidupan yang bahagia.

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi masyarakat Kabupaten Sikka serta mengacu pada RPJP Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 sebagai landasan idil dan filosofis pembangunan sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan yang dinamis dan berkesinambungan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Sikka yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023), adalah terwujudnya:

“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT
MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”.

Formulasi visi di atas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar;

Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam upaya mewujudkan Visi. Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Selain itu, Misi memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan agar sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat maka Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari Visi Jangka Panjang Kabupaten Sikka yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 dan RPJMD yang disusun mengacu pada Visi Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaah terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tujuan Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk pencapaian tujuan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan Indikator Nilai SAKIP, Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Indikator Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan, Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan.

2. Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan.
Sasaran Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap siklus pelaporan.
3. Meningkatnya kualitas hasil kajian Kelitbangan.
Sasaran Meningkatnya kualitas hasil kajian Kelitbangan dengan Indikator Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah.
4. Meningkatnya Profesionalitas ASN
Sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan.
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana
Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dengan Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi					
			Nilai SAKIP	68,46	72,71	76,96	80	84,22
			Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	92,00	100	100	100	100
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	97,30	98,80	99,80	99,85	100
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	93,18	95,18	97,68	99,68	100
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	88	90	92	94	96
			Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	12	17	22	27	32
		2. Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	80	82	85	90	95
		3. Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100	100	100	100	100
		4. Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	69	74	78	82	85
		5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang	0.22	0.28	0.37	0.47	0.63

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan adalah dengan merumuskan arah kebijakan, yaitu Peningkatan pengendalian, penyatuan dan upaya keterkaitan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan dan Peningkatan keterpaduan, sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan Penyediaan data yang valid dan reliabel dan Optimalisasi pola perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, melalui Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dan kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Peningkatan ketaatan Perangkat Daerah terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan.
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan ketaatan PD terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Kualitas SDM perangkat daerah dan Optimalisasi SOP pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
3. Peningkatan hasil kelitbangan sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan hasil kelitbangan sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Kajian Penelitian yang dihasilkan Peningkatan SDM dan kerjasama pelaku Kelitbangan dan Pendidikan dan Pelaksanaan Pelatihan ASN yang bergerak di bidang Kelitbangan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
4. Peningkatan profesionalitas ASN.
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan profesionalitas ASN adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Keterampilan Dasar, Sosial dan Mental ASN. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Perlengkapan/Peralatan perabot, interior dan tata ruang kantor. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada Tahun 2021.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP	68,46	68,46	72,71	76,96	80	84,22	84,22
2	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	92,00	92,00	100	100	100	100	100
3	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd	97,30	97,30	98,80	99,80	99,85	100	100
4	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd Kedalam APBD	93,18	93,18	95,18	97,68	99,68	100	100
5	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	88	88	90	92	94	96	96
6	Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	12	12	17	22	27	32	32
5	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	80	82	85	90	95	95	95
6	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Profesionalitas ASN	69	69	74	78	82	85	85
8	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang	0.22	0.22	0.28	0.37	0.47	0.63	0.63

2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sikka kepada Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka serta dari Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Adapun indikator kinerja sasaran strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	76.96
		Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	persen	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPDP	persen	99,80
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPDP Kedalam APBD	persen	100
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	persen	92
		Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan		22
2.	Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	persen	85
3.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	persen	100
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang	Indeks	0.37

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung Sebesar Rp9.815.287.451,-

Adapun program dan kegiatan tersebut diatas meliputi:

Tabel 2.4.
Program/Kegiatan dan Anggaran
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.105.441.931,-	APBD
	a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp49.089.300,-	APBD
	b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.926.969.453,-	APBD
	c) Administarasi Umum Perangkat Daerah	Rp574.835.700,-	APBD
	d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp412.287.278,-	APBD
	e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp142.260.200,-	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.209.282.600,-	APBD
	a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp338.327.200,-	APBD
	b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp214.887.800,-	APBD
	c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp656.067.600,-	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp407.437.170,-	APBD
	a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp122.547.300,-	APBD
	b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp118.078.070,-	APBD
	c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp166.811.800,-	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp4.093.125.750,-	APBD
	a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp2.607.246.500,-	APBD
	b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp1.018.759.400,-	APBD
	c) Pengembangan Teknologi dan Inovasi	Rp467.119.850,-	APBD

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 2021 dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dengan Bupati Sikka.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tahun 2018-2023. Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021 dapat diuraikan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP		Nilai	84.22 (A)	76.96 (B)	70.72	91.90
		Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan}}{\text{Jml perangkat daerah}} \times 100$	persen	100	100	100	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPDP	$\frac{\text{Jml Prog. RKPDP Tahun berkenaan}}{\text{Jml. Prog. RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100$	persen	100	99.80	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	$\frac{\text{Jml Prog. RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jml. Prog. RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}}$	x 100	persen	100	100	93.98	93.98
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	$\frac{\text{Jml masyarakat yg hadir dlm Musrenbang}}{\text{Jumlah peserta Musrenbang}}$	x 100	persen	100	92	30	32.61
		Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	$\frac{\text{Jml anak yg hadir dlm Musrenbang}}{\text{Jumlah peserta Musrenbang}}$	x 100		32	22	4.29	19.48
2.	Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$	x 100	persen	100	85	89.60	105
3.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas kegiatan Kelitbangan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	$\frac{\text{Jml hasil kajian Kelitbangan yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml hasil kajian Kelitbangan tahun berkenaan}}$	x 100	persen	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka			Indeks	85	78	91.85	117.76
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Bapelitbang			Indeks	0.63	0.37	1.43	386.49

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari data tersebut diatas, Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan sebesar 100% dari target Tahun 2021 sebesar 100%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD Tahun 2021 sebesar 100% dari target Tahun 2021 sebesar 99.80% sedangkan target akhir periode Renstra sebesar 100%. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD Tahun 2021 sebesar 93.98% dari target Tahun 2021 sebesar 93.98% sedangkan target akhir periode Renstra sebesar 100%. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan sebesar 32.61% target Tahun 2021 sebesar 92% dan target akhir periode Renstra sebesar 100%. Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan Tahun 2021 sebesar 19.48 dari target Tahun 2021 sebesar 22 sedangkan target akhir periode Renstra sebesar 32. Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap siklus pelaporan dengan target

tahun 2021 sebesar 89.60% realisasi pada Tahun 2021 sebesar 105% sedangkan target akhir RPJMD adalah sebesar 100%. Persentase hasil kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan Tahun 2021 sebesar 100% dan target akhir periode Renstra sebesar 100%.

Gambaran perbandingan pencapaian target kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021 yang mengalami perubahan pada beberapa indikator kinerja dapat disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan pencapaian kinerja pada sasaran tahun 2019, 2020 dan 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA THN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA THN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA THN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Persen	69	89.32	129.45	74	89.02	120.30	78	91.85	117.76
2	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Indeks	0.22	0.18	81.82	0.28	0.33	117.86	0.37	1.43	386.49
3	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Nilai	23.96	24.38	101.75	-	-	-	-	-	-
4	Nilai Pengukuran Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Nilai	15.61	15	96.09	-	-	-	-	-	-
5	Nilai Pelaporan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Nilai	9.72	9.67	99.49	-	-	-	-	-	-
	Nilai SAKIP	Nilai	68.46	72.27	105.60	72.71	72.27	99.39	76.96 (BB)	70.72 (BB)	91.90
1	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	Persen	92.00	-	-	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Konsistensi Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPDP	Persen	97.30	98.00	100.72	98.80	98.30	99.49	99.80	100	100
3	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPDP Kedalam APBD	Persen	93.18	89.70	96.26	95.18	99.09	104.11	100	93.98	93.98
4	Persentase Peran serta Masyarakat proses perencanaan	Persen	88.00	95.05	108.01	90.00	75.20	83.56	92	30	32.61
5	Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	Persen	12	12	100	17	17.65	96.33	22	4.29	19.48

6	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	Persen	80	76.53	95.66	82.00	76.24	92.97	85	89.60	105
7	Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bapelitbang Kab.Sikka 2021

Selanjutnya hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program/kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing- masing indikator. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021 berdasarkan Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

3.1.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator (1) : Nilai SAKIP

Indikator (2) : Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan

Indikator (3) : Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Indikator (4) : Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD

Indikator (5) : Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan

Indikator (6) : Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Meningkatnya koordinasi dan tata kelola perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai SAKIP	76.96	70.72	91.90
	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	100	100	100
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	99.80	100	100
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100	93.98	93.98
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan	92	30	32.61
	Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	22	4.29	19.48

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja dari Nilai SAKIP Bapelitbang Kab. Sikka pada Tahun 2021 adalah sebesar 91.90%, Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan pada Tahun 2021 adalah sebesar 100%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD pada Tahun 2021 adalah sebesar 100%, capaian Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD pada tahun 2021 sebesar 93.98%, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan pada Tahun 2021 adalah sebesar 32.61, Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan pada Tahun 2021 adalah sebesar 19.48, kondisi capaian ini menunjukkan bahwa pada beberapa indikator Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka belum mencapai target yang ditetapkan hal ini terjadi sebagai akibat dari pandemi covid 19 yang mempengaruhi semua sektor baik ditingkat pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan.

Pencapaian sasaran ini ditempuh melalui pengalokasian anggaran dan realisasi pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Capaian Anggaran Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2021	Realisasi Anggaran 2021	Capaian 2021
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Nilai SAKIP				
	2. Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan				
	3. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD				
	4. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD				
	5. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan				
	6. Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan				
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.209.282.600,-	Rp935.579.400,-	77.37
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp338.327.200,-	Rp274.223.900,-	81.05	
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp214.887.800,-	Rp175.335.600,-	81.59	
			Rp276.607.500,-	Rp224.779.750,-	81.32

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 81.32% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 3.97% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi

gaji dan tunjangan lainnya. Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai dalam program ini melalui 2 kegiatan untuk mendukung pencapaian 5 indikator diatas adalah sebesar 81.32%. Capaian program tersebut antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi antara lain disebabkan karena :

1. Mewabahnya covid 19 yang berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas;
2. Kebijakan refocusing dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid 19 baik dari pemerintah pusat maupun daerah;
3. Adanya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan Musrenbang sebagai kegiatan rutinitas;
4. Usulan masyarakat yang belum direalisasi;
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan realisasi rencana;
6. Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks;
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pengendalian yang belum optimal;
8. Data perencanaan yang belum komprehensif baik dari validitas maupun realibilitas;

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut diatas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1. Perlu sosialisasi dan diseminasi secara berkala dan berjenjang berbagai jenis perencanaan;
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk usulan masyarakat.
3. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin;
4. Menentukan prioritas pembangunan berdasarkan isu strategis yang telah ditetapkan;
5. Peningkatan dan pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
6. perbaikan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan;

3.1.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 Indikator (7)

Sasaran 2 : Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan

Indikator (7) : Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator (7)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	85	89.60	100

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan pada Tahun 2021 mencapai 100%.

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6.
Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator (7)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2021	Realisasi Anggaran 2021	Capaian 2021
Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan	7. Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.209.282.600,-	Rp935.579.400,-	77.37
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp656.067.600,-	Rp.486.019.900,-	74.08
			Rp656.067.600,-	Rp.486.019.900,-	74.08

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 74.08% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 9.42% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya. Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai dalam program ini sebesar 74.08%. Capaian program tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3.1.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran 3 Indikator (8)

- Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan
Indikator (3) : Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator (8)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah	100	100	100%

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase Hasil Kelitbangan Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah pada Tahun 2021 mencapai 100%.

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Capaian Anggaran Sasaran 3 Indikator (8)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2021	Realisasi Anggaran 2021	Capaian 2021
Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.4.093.125.750,-	Rp3.692.708.926,-	90.22

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 90.22% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 58.77% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi

gaji dan tunjangan lainnya. Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatannya adalah :

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan Penelitian dan Penyusunan Kajian Lingkungan Bidang Jalan, Irigasi dan Kesehatan untuk Kebutuhan Pinjaman Daerah dan Kegiatan Fasilitasi Proses Pengajuan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021.
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan berupa penyusunan kajian Investasi Daerah, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan berupa penyusunan kajian Komoditas Ikan Ekonomis Penting dan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berupa penyusunan kajian Transportasi Lokal (Tatralok) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang).
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Kegiatan ini dicapai melalui sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi berupa pelaksanaan operasional produksi Cokelat Sikka (chosik).

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang antara lain disebabkan karena :

1. Ruang lingkup wilayah dengan prosentase sasaran kegiatan yang sangat luas berbanding waktu kegiatan yang singkat serta kebijakan pemerintah terkait pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah akibat covid 19.
2. Kurangnya tenaga pendampingan pada kelompok sasaran responden
3. Kegiatan updating data Indeks Kepuasan Masyarakat, updating data Indeks Kebahagiaan, updating data Indeks Rasa Aman dan Nyaman, updating data Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Publik tidak dapat dilakukan sebagai dampak dari mewabahnya covid 19 serta pembatasan aktivitas masyarakat dan rasionalisasi serta refocusing anggaran untuk penanganan covid 19.
4. Pelaksanaan produksi membutuhkan pasokan bahan baku yang tidak bisa diprediksi karena harus menunggu pengajuan proses keuangan
5. Pelaksanaan pembelian komoditi untuk bahan produksi dan alat-alat bantu produksi dilaksanakan akhir kalender kerja

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut diatas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1. Penyiapan kegiatan bersama dengan mempertimbangkan ruang lingkup lokasi
2. Transfer pengetahuan dari pihak ketiga untuk analisis indeks pada bidang Litbang
3. Pengajuan penggunaan anggaran pada UPT SIC sebaiknya menggunakan

sistem LS agar dapat diprediksi alokasi penggunaannya.

4. Kegiatan updating data kajian ilmiah seperti tersebut diatas dilaksanakan dengan efisiensi waktu dan anggaran serta mematuhi protokol kesehatan.

3.1.4. Pengukuran Pencapaian Sasaran 4 Indikator (9)

Sasaran 4 : Meningkatnya Profesionalitas ASN

Indikator (9) : Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Tabel 3.9.
Capaian Kinerja Sasaran 4 Indikator (9)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	78	91.85	117.76

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka pada Tahun 2021 sebesar 91.85.

Alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Capaian Anggaran Sasaran 4 Indikator (9)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2021	Realisasi Anggaran 2021	Capaian 2021
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp1.255.075.778,-	Rp791.006.216,-	63.02
			Rp1.255.075.778,-	Rp791.006.216,-	63.02

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 63.02% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 18.02% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya.

Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai dalam program ini sebesar 63.02%. Capaian program tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- Kegiatan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sesuai kalender kerja;
2. Kurang tertibnya pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu;
3. Pelaksanaan SOP terkait administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan kurang maksimal.

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut diatas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1. Manajemen waktu atau manajemen prioritas;
2. Optimalisasi Penerapan SOP

3.1.5. Pengukuran Pencapaian Sasaran 5 Indikator (10)

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Indikator (10) : Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Sasaran 5 Indikator (10)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	0.37	1.43	386.49

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka pada Tahun 2021 sebesar 1.43.

Alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.12.
Capaian Anggaran Sasaran 5 Indikator (10)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2021	Realisasi Anggaran 2021	Capaian 2021
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.255.075.778,-	Rp791.006.216,-	63.02
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp142.260.200,-	Rp92.298.428,-	64.88
			Rp142.260.200,-	Rp92.298.428,-	64.88

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

Dari tabel di atas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 64.88% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 2.04% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya.

Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai dalam program ini sebesar 64.88%.

Capaian program tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik antara lain disebabkan karena :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sesuai kalender kerja;
2. Pengendalian internal yang kurang memadai.

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut di atas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1. Manajemen waktu atau manajemen prioritas;
2. Sistem pengendalian internal.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

- Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Manusia :

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan memiliki kualitas yang baik serta profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kaitan antara manajemen sumberdaya manusia dengan peningkatan kinerja sangat berhubungan erat sehingga menjadi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan :

Pertama, Kegiatan pelatihan-pelatihan dan diklat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan dan penganggarannya sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada tahun-tahun yang akan datang.

Kedua, Melakukan pengawasan melekat internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai pada unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ketiga, Memberikan reward dan punishment kepada pegawai sesuai kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

- Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana :

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ditunjang dengan sejumlah sarana dan prasarana kerja. Kondisi yang ada sarana prasarana kantor penunjang pelaksanaan kegiatan kantor seperti laptop dan printer dari sisi jumlah dan ketersediaan pegawai belum memadai.

Selain itu kondisi bangunan kantor khususnya UPT. SIC yang masih belum memadai dan rusak berakibat pada terjadinya tindak kriminal pencurian yang mengganggu kelangsungan aktivitas produksi pada UPT SIC demikian pula pada kantor Bapelitbang Kab. Sikka yang terjadi pada tahun 2020 dan hingga tahun 2021 belum terselesaikan, kondisi ini yang juga menjadi salah satu faktor yang memperlambat pelaksanaan tugas tepat waktu serta mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja.

Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

- Untuk tahun 2021, pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan 4 program dan 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan telah dilaksanakan, namun ada beberapa kegiatan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dengan baik karena masing-masing program/kegiatan masih memiliki presentase anggaran yang tidak dapat terserap seluruhnya sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja maupun realisasi anggaran.
- Oleh karena itu untuk tahun-tahun yang akan datang perlu diberi perhatian khusus terkait perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan, dan tertib dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan sehingga pencapaian kinerja dapat meningkat dan presentase realisasi anggaran juga dapat terserap dengan baik. Dari 4 program dan 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka semuanya sangat menunjang keberhasilan kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

3.2. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Pendapatan

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mengelola Pendapatan Daerah dari hasil penjualan Cho-Sik yang dikelola oleh UPT Sikka Inovation Centre.

Tahun 2021 target pendapatan sebesar Rp237.051.750,- dengan realisasi sebesar Rp.109.826.000,- atau sebesar 46.33%.

3.2.2. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tahun 2021 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mengalokasikan Belanja Pegawai sebesar Rp2.894.841.153,- dengan realisasi sebesar Rp2.790.485.783,- atau 98.24% yang secara rinci dapat dilihat Tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.13.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA PEGAWAI	2,849,931,598	2,790,485,783	98.24
1.	Gaji Pokok/Uang Representasi	1,807,904,253	1,743,141,800.00	96.42
2.	Tunjangan Keluarga	167,064,803	157,064,588.00	94.01
3.	Tunjangan Jabatan	265,090,000	265,090,000.00	100
4.	Tunjangan Fungsional	29,704,931	21,850,000.00	73.56
5.	Tunjangan Beras	103,311,962	100,084,440.00	96.88
6.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,774,588	1,853,487.00	66.80
7.	Pembulatan Gaji	43,696	25,148.00	57.55
8.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS	463,471,920	461,326,320	99.54
9.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11.000.000	--	-
10.	Honorarium Tim Pengelola Capain Kinerja Program	9.600.000	9.600.000	100
11.	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	27.600.000	24.900.000	90.22
12.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.475.000	750.000	30.30
13.	Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.800.000	4.800.000	100

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

3.2.3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2021 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mengalokasikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6,915,443,898,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp5,687,515,342,- atau 82.24% yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA BARANG DAN JASA	6,915,443,898,-	5,687,515,342,-	82.24
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,210,600,778,-	750,956,216,-	62.03
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,489,300,-	34,690,000,-	87.85
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28,827,600,-	32,957,600,-	78.98
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	574,835,700,-	227,803,924,-	39.63
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412,287,278,-	363,206,264,-	88.10
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142,260,200,-	92,298,428,-	64.88
1	2	3	4	5
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,209,282,600,-	935,579,400,-	77.37
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	338,327,200,-	274,223,900,-	81.05
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	214,887,800,-	175,335,600,-	81.59
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	656,067,600,-	486,019,900,-	74.08
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	407,437,170,-	308,270,800,-	75.66
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	122,547,300,-	104,229,500,-	85.05
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	118,078,070,-	74,627,600,-	63.20
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	166,811,800,-	129,413,700,-	77.58
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4,088,123,350,-	3,629,708,926,-	90.33
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2,607,246,500,-	2,333,512,154,-	89.50
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,018,759,400,-	998,325,000,-	97.99
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	462,117,450,-	360,871,772,-	78.09

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2021

3.2.4. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2021 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp5,002,400,- namun dari rencana yang telah dibuat belanja Modal tersebut tidak dapat direalisasikan sebagai akibat dari adanya kebijakan larangan pencairan anggaran khusus Belanja Modal. Tabel Belanja Modal dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.15.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2021
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.002.400	--	--
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.002.400	--	--

Sumber : Bapelitbang Kab. Sikka, 2021

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya seluruh capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada Tahun 2021 belum semuanya dapat tercapai secara maksimal. Tahun 2021 merupakan tahun awal pelaksanaan kegiatan yang mengukur indikator kinerja berdasarkan dokumen perencanaan perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021 berisikan informasi-informasi pengelolaan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

a. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021 dapat dilihat pada Nilai SAKIP realisasi capaiannya 70,72 (BB), Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan capaiannya 100%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD capaiannya 100%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD 93.98%, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan capaiannya 30%, Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan capaiannya 4.29%, Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan capaiannya 89.60%, Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan capaiannya 100%, Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka capaiannya 91.85%, Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka capaiannya 1.43%. Pencapaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka beberapa sudah cukup optimal, dan perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan sedangkan untuk beberapa indikator kinerja yang belum tercapai perlu menjadi perhatian dan lebih ditingkatkan.

b. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2021 alokasi anggaran Belanja Operasi yang digunakan untuk pencapaian sasaran khususnya Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal adalah sebesar Rp3,198,560,457,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp3,112,972,187,- atau sebesar 97.48%. Dari persandingan antara persentase realisasi anggaran dengan persentase pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran di Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021 masih perlu ditingkatkan.

Sebagai penutup Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya

4.2. Saran dan Rekomendasi

Evaluasi atas capaian hasil penyelenggaraan pemerintahan khususnya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, merupakan komitmen moral terhadap perbaikan kinerja yang dicapai. Hal ini menjadi landasan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sikka ke depan. Untuk itu marilah bersama-sama satukan kekuatan, rajut kebersamaan dan ciptakan kerjasama yang profesional.

Selanjutnya, pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah, melalui (1) peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana; (2) peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan; dan (3) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat.
3. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intens, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sektor.

Maumere, 11 Pebruari 2022
Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Sikka,



Margaretha Movaldes DM Bapa, ST, M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP.19761206 200012 2 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	76.96
		Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	Persen	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	persen	99.80
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	persen	100
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	persen	92
		Persentase Partisipasi Anak dalam proses perencanaan	persen	22
2.	Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	persen	85
3.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan Daerah	persen	100
4.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	persen	78
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	persen	0.37

Maumere, 4 Januari 2021

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Sikka,



KONSTANSIA TUPA ARANKOJA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.19701218 199003 2 003

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	HASIL PENGUKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	nilai	76.96	70.72	91.90
		Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	persen	100	100	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKP	persen	99.80	100	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKP Kedalam APBD	persen	100	93.98	93.98
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	persen	92	30	32.61
		Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	persen	22	4.29	19.48
2.	Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	persen	85	89.60	105
3.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan Daerah	persen	100	100	100
4.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	persen	78	91.85	117.76
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	persen	0.37	1.43	386.49

Jumlah Anggaran 2021

Rp.9.815.287.451,-

Jumlah Realisasi Anggaran 2021

Rp.8.478.001.125,-

Maumere, 11 Pebruari 2022

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka,



Margaretha Movaldes D.M Bapa, ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	SATUAN	TARGET	ANGGARAN / TRIWULAN				JUMLAH ANGGARAN
							I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Nilai SAKIP	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100	481,289,450	534,361,850	265,706,350	265,222,150	1,546,579,800
		2. Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Persen	100	216,583,100	177,728,500	-	-	394,311,600
		3. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	OPD	60	30,661,300	32,352,100	-	-	63,013,400
		4. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Musrenbang Kabupaten	Orang	450	81,970,800	145,376,400	-	-	227,347,200
		5. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kecamatan yang Dihasilkan	Dokumen	21	103,951,000	-	-	-	103,951,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		6. Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	4	98,585,000	190,304,700	99,485,000	98,799,300	487,174,000
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	55,747,500	146,447,500	56,497,500	55,911,800	314,604,300
				Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Diamankan	Dokumen	1					
				Jumlah Data dan Informasi untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen	1					
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah yang Disusun	Dokumen	1	42,837,500	43,857,200	42,987,500	42,887,500	172,569,700
2.	Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan	7. Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100	166,121,350	166,328,650	166,221,350	166,422,850	665,094,200
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan DAK, TP yang Dihasilkan	Dokumen	1	45,305,425	45,512,725	45,405,425	45,606,925	181,830,500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD yang dihasilkan	Dokumen	1	120,815,925	120,815,925	120,815,925	120,815,925	483,263,700
		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah dihasilkan		Dokumen	1						
		Jumlah Dokumen SPM, Evaluasi RPJMD dan SDGs		Dokumen	2						
		Jumlah Dokumen TKPKD yang Dihasilkan		Laporan	1						
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	215,705,300	600,494,900	736,059,000	777,407,900	2,329,667,100
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	27,045,000	197,673,200	247,159,800	254,827,500	726,705,500
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	Dokumen	36	8,187,400	17,525,000	24,800,000	3,000,000	53,512,400
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	Dokumen	36	1,880,800	2,075,100	23,087,500	1,687,500	28,730,900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang di monitoring dan evaluasi	Dokumen	36	-	6,757,400	23,354,000	22,822,400	52,933,800
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	Dokumen	62	16,976,800	138,840,000	67,761,000	46,086,000	269,663,800
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	Dokumen	62	-	27,475,700	62,976,300	9,750,000	100,202,000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi	Dokumen	62	-	5,000,000	45,181,000	171,481,600	221,662,600
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100	98,356,000	179,514,100	209,434,600	275,786,900	763,091,600
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	Dokumen	14	25,201,000	45,926,500	54,777,100	57,671,900	183,576,500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistensi	Dokumen	14	27,490,000	51,410,000	61,660,000	66,640,000	207,200,000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi	Dokumen	14	23,725,000	48,787,500	60,387,500	77,620,900	210,520,900
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dihasilkan	OPD	4	8,904,000	13,471,100	13,456,000	25,158,600	60,989,700
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang diasistensi	OPD	4	8,300,000	12,250,000	12,250,000	16,352,300	49,152,300
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dimonitoring dan evaluasi	OPD	4	4,736,000	7,669,000	6,904,000	32,343,200	51,652,200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	90,304,300	223,307,600	279,464,600	246,793,500	839,870,000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	Dokumen	20	19,801,400	56,325,000	77,506,000	69,062,000	222,694,400
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di asistensi	Dokumen	20	10,144,200	8,340,000	19,840,000	22,501,000	60,825,200
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	20	48,088,700	79,780,000	79,980,000	80,376,900	288,225,600
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	Dokumen	136	7,140,000	30,902,600	46,028,500	40,778,000	124,849,100
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	Dokumen	136	2,880,000	9,500,000	6,698,800	3,900,000	32,978,800
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	136	2,250,000	38,460,000	39,411,300	30,175,600	110,296,900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	1,192,957,715	1,142,922,329	1,180,583,042	1,177,561,948	4,694,025,034
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	16,950,700	16,579,900	16,579,900	16,543,000	66,653,500
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,212,325	4,909,825	4,909,825	4,909,825	19,941,800
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4,939,375	4,939,375	4,939,375	4,939,375	19,757,500
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	6,799,000	6,730,700	6,730,700	6,693,800	26,954,200
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	842,924,956	835,664,454	835,664,466	835,950,557	3,350,204,433
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bapelitbang Kab. Sikka yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang	38	831,392,306	831,392,304	831,392,316	831,392,307	3,325,569,233
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi (kuitansi, SPP, SPM, Pengajuan Permintaan Anggaran dan SPJ)	Dokumen	48	2,933,625	2,933,625	2,933,625	2,933,625	11,734,500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah	Dokumen	1	7,260,500	-	-	-	7,260,500
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Dokumen	3	1,338,525	1,338,525	1,338,525	1,624,625	5,640,200
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan	Persen	100	-	-	50,412,000	48,243,000	98,655,000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Teknis aparatur perencana	Orang	3	-	-	25,731,000	16,581,000	42,312,000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	3	-	-	24,681,000	31,662,000	56,343,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	107,911,070	100,620,672	100,620,673	100,620,685	409,773,100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan Kantor yang Tersedia	Jenis	15	1,063,125	1,063,125	1,063,125	1,063,125	4,252,500
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	Jenis	59	14,135,422	14,135,424	14,135,425	14,135,429	56,541,700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penghias Ruangan Rumah Tangga yang diadakan	Paket	1	7,290,400	-	-	-	7,290,400
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	OM	1800	22,196,250	22,196,250	22,196,250	22,196,250	88,785,000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Kantor yang tersedia dan Digandakan	Jenis	15	16,159,374	16,159,374	16,159,374	16,159,378	64,637,500
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Jumlah Iklan Surat Kabar/Majalah yang Tersedia	Jenis	3	795,000	795,000	795,000	795,000	3,180,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	kali	40	46,271,499	46,271,499	46,271,499	46,271,503	185,086,000
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	48,892,400	13,902,700	-	-	62,795,100
			Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diadakan	Unit	5	3,361,100	13,902,700	-	-	17,263,800
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	Paket	3	45,531,300	-	-	-	45,531,300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen	100	132,627,674	132,627,684	132,627,684	132,627,784	530,510,826
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk	surat	2,050	17,497,997	17,498,001	17,498,001	17,498,001	69,992,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi (internet, astinet, telepon), Sumber Daya Air & Listrik yg tersedia	bulan	12	84,885,177	84,885,183	84,885,183	84,885,183	339,540,726
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan yang tersedia Jumlah Honor dan luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian yang terbayar Jumlah Jasa Pengelola Keuangan yang tersedia	Jenis Org org	19 1 9	30,244,500	30,244,500	30,244,500	30,244,600	120,978,100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	43,650,915	43,526,919	44,678,319	43,576,922	175,433,075
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	unit	22	19,129,196	19,129,200	19,129,200	19,129,204	76,516,800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Honor, Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian yang terbayar Jumlah Upah Kerja yang terbayar Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	Org Org unit	1 2 22	10,203,500	10,203,500	10,203,500	10,203,500	40,814,000
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair yang dipelihara	Paket	1	947,869	947,869	2,099,269	947,868	4,942,875
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki	unit	2	657,350	657,350	657,350	657,350	2,629,400
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Paket	2	12,713,000	12,589,000	12,589,000	12,639,000	50,530,000
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		unit	38						
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara		unit	27						
5.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Persen	100	1,243,471,000	2,300,814,404	298,970,950	354,903,166	4,198,159,520
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbangan yang direkomendasikan	Persen	100	742,262,700	1,275,345,100	43,692,000	135,028,700	2,196,328,500
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Kelitbangan	Dokumen	2	742,262,700	1,275,345,100	43,692,000	135,028,700	2,196,328,500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	355,369,100	840,870,200	-	-	1,196,239,300
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang disusun	Dokumen	1	125,510,000	272,550,200	-	-	398,060,200
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang disusun	Dokumen	1	113,869,900	282,192,900	-	-	396,062,800
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang disusun	Dokumen	1	115,989,200	286,127,100	-	-	402,116,300
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Persen	100	145,839,200	184,599,104	255,278,950	219,874,466	805,591,720
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kegiatan	1	145,839,200	165,848,270	139,482,000	147,974,850	599,144,320
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Kegiatan	2	-	-	53,595,350	12,360,750	65,956,100
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi	Kegiatan	2	-	18,750,834	62,201,600	59,538,866	140,491,300

**REALISASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2021**

PROGRAM		PAGU ANGGARAN		RENCANA AKSI/TRIWULAN				REALISASI RENCANA AKSI/TRIWULAN				TOTAL REALISASI	%	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RENCANA DAN REALISASI RENCANA AKSI		12,768,431,454	9,815,287,451	2,550,911,196	3,567,694,918	1,745,612,242	1,950,769,083	1,366,806,759	3,348,918,999	1,348,225,557	2,414,049,810	8,478,001,125	72.33	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4,694,025,034	4,105,441,931	1,019,379,208	1,007,267,914	1,017,033,118	1,061,761,679	1,278,200,359	555,652,663	516,015,891	1,191,573,086	3,541,441,999	80.01	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,653,500	49,089,300	11,486,475	9,085,675	16,823,875	11,693,275	1,812,500	9,950,000	-	32,527,500	44,290,000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,941,800	23,371,800	7,442,550	5,310,050	5,310,050	5,309,150	1,812,500	4,910,000	-	16,628,100	23,350,600	95.54	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,757,500	22,457,500	3,214,375	3,214,375	10,414,375	5,614,375	-	5,040,000	-	15,899,400	20,939,400	80.36	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,954,200	3,260,000	829,550	561,250	1,099,450	769,750	-	-	-	-	-	-	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,350,204,433	2,926,969,453	737,116,257	729,855,755	729,855,759	730,141,682	1,169,041,423	389,800,370	445,650,082	809,351,508	2,813,843,383		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,325,569,233	2,850,366,153	712,591,657	712,591,655	712,591,659	712,591,182	1,168,861,423	381,150,370	438,300,082	762,123,908	2,750,435,783	83.58	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,734,500	63,702,600	15,925,575	15,925,575	15,925,575	15,925,875	180,000	8,650,000	7,350,000	43,077,600	59,257,600	127.14	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,260,500	7,260,500	7,260,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,640,200	5,640,200	1,338,525	1,338,525	1,338,525	1,624,625	-	-	-	4,150,000	4,150,000	73.58	
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98,655,000	17,481,000	-	-	17,481,000	-	-	-	-	-	-	-	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42,312,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56,343,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	409,773,100	574,835,700	131,301,000	131,301,000	131,328,000	180,905,700	70,793,800	17,168,424	1,271,600	138,570,100	227,803,924		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4,252,500	2,193,100	549,000	549,000	549,000	546,100	-	-	-	2,193,000	2,193,000	100.00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,541,700	134,627,800	33,657,000	33,657,000	33,657,000	33,656,800	28,199,900	-	88,000	103,389,200	131,677,100	232.88	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,290,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88,785,000	92,560,000	23,139,000	23,139,000	23,139,000	23,143,000	10,959,500	3,500,500	713,600	15,427,500	30,601,100	34.47		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64,637,500	131,844,800	32,961,000	32,961,000	32,961,000	32,961,000	26,534,400	1,544,400	-	16,825,400	44,904,200	69.47		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,180,000	3,180,000	795,000	795,000	795,000	795,000	-	330,000	470,000	735,000	1,535,000	48.27		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185,086,000	210,430,000	40,200,000	40,227,000	40,200,000	89,803,000	5,100,000	11,793,524	-	-	16,893,524	9.13		
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62,795,100	10,332,800	8,682,800	1,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
1	Pengadaan Mebel	17,263,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45,531,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530,510,826	412,287,278	103,072,430	103,072,434	103,072,434	103,069,968	33,117,664	119,365,793	50,929,159	159,793,648	363,206,264	91.08		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69,992,000	69,992,000	17,497,997	17,498,001	17,498,001	17,498,001	-	34,555,676	11,781,892	22,960,784	69,298,352	99.01		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339,540,726	194,627,178	48,657,933	48,657,933	48,657,933	48,653,367	32,189,764	38,301,549	23,794,911	59,096,752	153,382,976	75.96		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120,978,100	147,668,100	36,916,500	36,916,500	36,916,500	36,918,600	927,900	46,508,568	15,352,356	77,736,112	140,524,936	110.76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175,433,075	142,260,200	36,403,046	33,953,050	35,953,050	35,951,054	3,434,972	19,368,076	18,165,050	51,330,330	92,298,428	52.06	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76,516,800	76,516,800	19,129,196	19,129,200	19,129,200	19,129,204	3,434,972	6,726,684	8,276,000	20,119,402	38,557,058	50.39	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,814,000	40,814,000	10,203,500	10,203,500	10,203,500	10,203,500	-	11,341,392	7,380,464	21,860,928	40,582,784	99.43	
3	Pemeliharaan Mebel	4,942,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,629,400	2,629,400	657,350	657,350	657,350	657,350	-	-	198,586	250,000	448,586	17.06	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,530,000	22,300,000	6,413,000	3,963,000	5,963,000	5,961,000	-	1,300,000	2,310,000	9,100,000	12,710,000	25.22	
II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,546,579,800	1,209,282,600	306,293,550	359,918,650	242,942,800	300,127,600	56,412,500	262,252,400	139,100,000	477,814,500	935,579,400	66.45	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	394,311,600	338,327,200	107,268,750	145,606,450	27,749,000	57,703,000	49,037,500	110,757,500	12,300,000	102,128,900	274,223,900	72.28	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
1	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	63,013,400	190,628,500	32,755,150	72,421,350	27,749,000	57,703,000	-	44,537,500	-	89,413,500	133,951,000	68.61	
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	227,347,200	69,060,200	5,525,100	63,535,100	-	-	-	59,125,000	-	6,215,400	65,340,400	57.25	
3	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	103,951,000	78,638,500	68,988,500	9,650,000	-	-	49,037,500	7,095,000	12,300,000	6,500,000	74,932,500	106.97	
B.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	487,174,000	214,887,800	44,257,500	44,207,500	51,207,500	75,215,300	-	78,000,000	15,000,000	82,335,600	175,335,600	48.92	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	314,604,300	73,106,300	12,720,000	12,670,000	12,720,000	34,996,300	-	9,450,000	-	40,535,600	49,985,600	23.87	
2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	172,569,700	141,781,500	31,537,500	31,537,500	38,487,500	40,219,000	-	68,550,000	15,000,000	41,800,000	125,350,000	84.12	
C.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	665,094,200	656,067,600	154,767,300	170,104,700	163,986,300	167,209,300	7,375,000	73,494,900	111,800,000	293,350,000	486,019,900	72.53	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	181,830,500	356,580,300	87,396,300	87,733,700	88,615,300	92,835,000	-	15,800,000	76,800,000	249,700,000	342,300,000	118.99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	483,263,700	299,487,300	67,371,000	82,371,000	75,371,000	74,374,300	7,375,000	57,694,900	35,000,000	43,650,000	143,719,900	37.58	
III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,329,667,100	407,437,170	26,665,538	102,584,054	74,190,724	203,696,854	11,367,500	49,112,500	64,300,000	183,490,800	308,270,800	16.96	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
A.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	726,705,500	122,547,300	9,201,100	39,597,200	37,730,000	36,019,000	1,855,000	11,152,500	46,500,000	44,722,000	104,229,500	17.79	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	53,512,400	3,209,700	909,700	2,000,000	-	300,000	-	-	-	1,920,000	1,920,000	9.22	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28,730,900	3,799,400	193,300	206,100	3,400,000	-	-	-	-	2,880,000	2,880,000	13.12	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52,933,800	2,133,800	-	7,400	204,000	1,922,400	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	269,663,800	40,366,800	2,528,900	16,664,000	5,499,000	15,674,900	605,000	375,000	-	29,660,000	30,640,000	15.49
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100,202,000	69,712,000	5,214,000	19,019,700	27,820,300	17,658,000	900,000	10,777,500	46,500,000	10,262,000	68,439,500	71.51
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	221,662,600	3,325,600	355,200	1,700,000	806,700	463,700	350,000	-	-	-	350,000	0.17
B.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	763,091,600	118,078,070	7,760,138	24,121,854	14,123,624	71,772,454	1,687,500	3,580,000	10,000,000	59,360,100	74,627,600	13.29
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	183,576,500	21,381,300	1,350,000	8,668,200	2,610,000	8,753,100	-	-	6,000,000	14,999,600	20,999,600	13.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	207,200,000	15,875,500	2,755,838	2,446,254	2,446,254	8,227,154	1,125,000	-	-	14,750,500	15,875,500	11.18
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	210,520,900	21,954,900	531,000	1,026,400	1,027,500	19,370,000	-	-	-	13,400,000	13,400,000	8.84
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60,989,700	10,547,100	850,000	1,285,000	1,360,000	7,052,100	-	-	4,000,000	960,000	4,960,000	11.62
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49,152,300	10,493,170	1,603,300	5,120,000	1,649,870	2,120,000	562,500	3,580,000	-	-	4,142,500	13.14
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51,652,200	37,826,100	670,000	5,576,000	5,030,000	26,250,100	-	-	-	15,250,000	15,250,000	40.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
C.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	839,870,000	166,811,800	9,704,300	38,865,000	22,337,100	95,905,400	7,825,000	34,380,000	7,800,000	79,408,700	129,413,700	19.30	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	222,694,400	38,881,400	2,491,400	540,000	15,290,000	20,560,000	-	14,280,000	-	8,100,000	22,380,000	11.99	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60,825,200	15,079,200	1,804,200	13,275,000	-	-	625,000	12,600,000	-	-	13,225,000	21.74	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	288,225,600	15,758,700	5,408,700	2,250,000	2,250,000	5,850,000	-	-	3,600,000	12,158,700	15,758,700	9.07	
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	124,849,100	68,737,800	-	7,500,000	3,008,000	58,229,800	-	7,500,000	-	47,750,000	55,250,000	47.84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32,978,800	8,637,800	-	3,900,000	837,800	3,900,000	-	-	-	7,800,000	7,800,000	28.66	
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110,296,900	19,716,900	-	11,400,000	951,300	7,365,600	7,200,000	-	4,200,000	3,600,000	15,000,000	14.08	
IV	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4,198,159,520	4,093,125,750	1,198,572,900	2,097,924,300	411,445,600	385,182,950	20,826,400	2,481,901,436	628,809,666	561,171,424	3,692,708,926	90.75	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
A.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2,196,328,500	2,607,246,500	890,209,400	1,156,164,200	297,447,000	263,425,900	20,826,400	1,841,467,800	202,568,954	268,649,000	2,333,512,154	96.18	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	2,196,328,500	2,607,246,500	890,209,400	1,156,164,200	297,447,000	263,425,900	20,826,400	1,841,467,800	202,568,954	268,649,000	2,333,512,154	96.18	
B.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,196,239,300	1,018,759,400	198,258,700	820,218,600	282,100	-	-	540,000,000	377,850,000	80,475,000	998,325,000	85.13	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	398,060,200	343,767,400	93,215,000	250,552,400	-	-	-	180,000,000	128,400,000	28,325,000	336,725,000	83.72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	396,062,800	345,454,500	102,119,900	243,052,500	282,100	-	-	180,000,000	129,450,000	27,975,000	337,425,000	84.49	
3	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	402,116,300	329,537,500	2,923,800	326,613,700	-	-	-	180,000,000	120,000,000	24,175,000	324,175,000	87.34	
C.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	805,591,720	467,119,850	110,104,800	121,541,500	113,716,500	124,475,250	-	100,433,636	48,390,712	212,047,424	360,871,772	76.80	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	599,144,320	113,716,500	113,716,500	113,716,500	113,716,500	124,475,250	-	100,433,636	48,390,712	212,047,424	360,871,772	76.80	
2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	65,956,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	140,491,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Maumere, 11 Pebruari 2022
Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka,

Margaretha Movaldes D.M Bapa, ST, M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP.19761206 200012 2 003

MONEV RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)	TARGET	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN / TRIWULAN				PENANGGUNGJAWAB	REALISASI JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN			
			1	2	3	4					1	2	3	4		1	2	3	4
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	76.96																	
	1. Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	100																	
	2. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	98.80																	
	3. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100																	
	4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	92																	
	5. Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	22																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4.66	21.69	11.50	39.51	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	1,209,282,600	56,412,500	262,252,400	139,100,000	477,814,500					
			14.49	32.74	3.64	30.19	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100%	338,327,200	49,037,500	110,757,500	12,300,000	102,128,900	Bidang PPEPD - Bapelitbang Kab. Sikka				
			-	23.36	-	46.90	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	60 OPD	190,628,500	-	44,537,500	-	89,413,500					
			-	85.61	-	9.00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Musrenbang Kabupaten	450 Org	69,060,200	-	59,125,000	-	6,215,400					
			62.36	9.02	15.64	8.27	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kecamatan yang Dihadirkan	21 Dok	78,638,500	49,037,500	7,095,000	12,300,000	6,500,000					
			-	36.30	6.98	38.32	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dok	214,887,800	-	78,000,000	15,000,000	82,335,600	Bidang PPEPD - Bapelitbang Kab. Sikka				
			-	12.93	-	55.45	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dok	73,106,300	-	9,450,000	-	40,535,600					
						Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Diamankan		1 Dok											
						Jumlah Data dan Informasi untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan		1 Dok											
			-	48.35	10.58	29.48	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah yang Disusun	1 Dok	141,781,500	-	68,550,000	15,000,000	41,800,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya ketaatan Daerah terhadap Siklus Pelaporan	7. Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	85																		
			1.12	11.20	17.04	44.71	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dok/Lap	656,067,600	7,375,000	73,494,900	111,800,000	293,350,000	Bidang PPEPD - Bapalitbang Kab. Sikka					
			-	4.43	21.54	70.03	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan DAK, TP yang Dihasilkan	1 Dok	356,580,300	-	15,800,000	76,800,000	249,700,000						
			2.46	19.26	11.69	14.57	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RPKD yang dihasilkan	1 Dok	299,487,300	7,375,000	57,694,900	35,000,000	43,650,000						
								Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah dihasilkan	1 Dok											
								Jumlah Dokumen SPM, Evaluasi RPJMD dan SDGs	2 Dok											
								Jumlah Dokumen TKPKD yang Dihasilkan	1 Lap											
			2.79	12.05	15.78	45.04	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	407,437,170	11,367,500	49,112,500	64,300,000	183,490,800						
			1.51	9.10	37.94	36.49	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	122,547,300	1,855,000	11,152,500	46,500,000	44,722,000	Bidang PPM - Bapalitbang Kab. Sikka					
				-	-	-	59.82	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	36 Dok	3,209,700	-	-	-	1,920,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			-	-	-	75.80	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	36 Dok	3,799,400	-	-	-	2,880,000	-				
			-	-	-	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang di monitoring dan evaluasi	36 Dok	2,133,800	-	-	-	-	-				
			1.50	0.93	-	73.48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	62 Dok	40,366,800	605,000	375,000	-	29,660,000	-				
			1.29	15.46	66.70	14.72	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	62 Dok	69,712,000	900,000	10,777,500	46,500,000	10,262,000	-				
			10.52	-	-	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi	62 Dok	3,325,600	350,000	-	-	-	-				
			1.43	3.03	8.47	50.27	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	118,078,070	1,687,500	3,580,000	10,000,000	59,360,100	Bidang PSDA - Bapelitbang Kab. Sikka				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			-	-	28.06	70.15	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	14 Dok	21,381,300	-	-	6,000,000	14,999,600					
			7.09	-	-	92.91	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistensi	14 Dok	15,875,500	1,125,000	-		14,750,500					
			-	-	-	61.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi	14 Dok	21,954,900	-	-		13,400,000					
			-	-	37.93	9.10	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dihasilkan	4 OPD	10,547,100	-	-	4,000,000	960,000					
			5.36	34.12	-	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang diasistensi	4 OPD	10,493,170	562,500	3,580,000		-					
			-	-	-	40.32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dimonitoring dan evaluasi	4 OPD	37,826,100	-	-		15,250,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4.69	20.61	4.68	47.60	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	166,811, 800	7,825,000	34,380,000	7,800,000	79,408,700	Bidang IW - Bapelitban g Kab. Sikka				
			-	36.73	-	20.83	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	20 Dok	38,881,40 0	-	14,280,000		8,100,000					
			4.14	83.56	-	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di asistensi	20 Dok	15,079,20 0	625,000	12,600,000		-					
			-	-	22.84	77.16	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di Monitoring dan Evaluasi	20 Dok	15,758,70 0	-	-	3,600,000	12,158,700					
			-	10.91	-	69.47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	136 Dok	68,737,80 0	-	7,500,000		47,750,000					
			-	-	-	90.30	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	136 Dok	8,637,800	-	-		7,800,000					
			36.52	-	21.30	18.26	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi	136 Dok	19,716,90 0	7,200,000	-	4,200,000	3,600,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	78																		
		31.13	13.53	12.57	29.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	4,105,441,931	1,278,200,359	555,652,663	516,015,891	1,191,573,086						
		3.69	20.27	-	66.26	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	49,089,300	1,812,500	9,950,000	-	32,527,500	Bagian Program - Bapelitbang Kab. Sikka					
		7.76	21.01	-	71.15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	23,371,800	1,812,500	4,910,000		16,628,100						
		-	22.44	-	70.80	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	22,457,500	-	5,040,000		15,899,400						
		-	-	-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	3,260,000	-	-		-						
		39.94	13.32	15.23	27.65	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	2,926,969,453	1,169,041,423	389,800,370	445,650,082	809,351,508	Bagian Keuangan - Bapelitbang Kab. Sikka					
		41.01	13.37	15.38	26.74	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bapelitbang Kab. Sikka yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	38 Org	2,850,366,153	1,168,861,423	381,150,370	438,300,082	762,123,908						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			0.28	13.58	11.54	67.62	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi (kuitansi, SPP, SPM, Pengajuan Permintaan Anggaran dan SPJ)	48 Dok	63,702,600	180,000	8,650,000	7,350,000	43,077,600					
			-	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah	1 Dok	7,260,500	-	-	-	-					
			-	-	-	73.58	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	3 Dok	5,640,200	-	-	-	4,150,000					
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan	100%	-	-	-	-	-	Bagian Kepegawaian - Bapelitbang Kab. Sikka				
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Teknis aparatur perencanaan	-- Org	-	-	-	-	-					
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	-- Org	-	-	-	-	-					
			12.32	2.99	0.22	24.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	574,835,700	70,793,800	17,168,424	1,271,600	138,570,100	Sekretariat - Bapelitbang Kab. Sikka				
			-	-	-	100.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan Kantor yang Tersedia	15 Jenis	2,193,100	-	-	-	2,193,000					
			20.95	-	0.07	76.80	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	59 Jenis	134,627,800	28,199,900	-	88,000	103,389,200					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penghias Ruangan Rumah Tangga yang diadakan	-- Paket	-	-	-	-	-						
			11.84	3.78	0.77	16.67	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	1800 OM	92,560,000	10,959,500	3,500,500	713,600	15,427,500						
			20.13	1.17	-	12.76	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Kantor yang tersedia dan Digandakan	15 Jenis	131,844,800	26,534,400	1,544,400	-	16,825,400						
			-	10.38	14.78	23.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Jumlah Iklan Surat Kabar/Majalah yang Tersedia	3 Jenis	3,180,000	-	330,000	470,000	735,000						
			2.42	5.60	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	40 Kali	210,430,000	5,100,000	11,793,524	-	-						
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	0.37																		
			-	-	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	0%	-	-	-	-	-		Sekretariat - Bapelitbang Kab. Sikka				
			-	-	-	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diadakan	-- Unit	-	-	-	-	-						
			-	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	-- Paket	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			8.03	28.95	12.35	38.76	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	412,287,278	33,117,664	119,365,793	50,929,159	159,793,648	Sekretariat - Bapelitbang Kab. Sikka				
			-	49.37	16.83	32.80	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar dan surat yang masuk	2.050 Surat	69,992,000	-	34,555,676	11,781,892	22,960,784					
			16.54	19.68	12.23	30.36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi (internet, astinet, telepon), Sumber Daya Air & Listrik yg tersedia	12 Bulan	194,627,178	32,189,764	38,301,549	23,794,911	59,096,752					
			0.63	31.50	10.40	52.64	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan yang tersedia Jumlah Honor dan luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian yang terbayar Jumlah Jasa Pengelola Keuangan yang tersedia	19 Jenis 2 Org 9 Org	147,668,100	927,900	46,508,568	15,352,356	77,736,112					
			2.41	13.61	12.77	36.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	142,260,200	3,434,972	19,368,076	18,165,050	51,330,330	Sekretariat - Bapelitbang Kab. Sikka				
			4.49	8.79	10.82	26.29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	22 Unit	76,516,800	3,434,972	6,726,684	8,276,000	20,119,402					
			-	27.79	18.08	53.56	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Honor, luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian yang terbayar Jumlah Upah Kerja yang terbayar	1 Org 2 Org	40,814,000	-	11,341,392	7,380,464	21,860,928					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	22 Unit										
			-	-	-	-	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair yang dipelihara	-- Paket	-	-	-	-	-					
			-	-	7.55	9.51	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki	2 Unit	2,629,400	-	-	198,586	250,000					
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	2 Paket 38 Unit 27 Unit	22,300,000	-	1,300,000	2,310,000	9,100,000					
Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang	Persentase Hasil Kelitbang an dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100																	
			0.51	60.64	15.36	13.71	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbang an yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	4,093,125,750	20,826,400	2,481,901,436	628,809,666	561,171,424					
			0.80	70.63	7.77	10.30	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbang an yang di rekomendasikan	100%	2,607,246,500	20,826,400	1,841,467,800	202,568,954	268,649,000	Bidang Litbang - Bapelitbang Kab. Sikka				
			0.80	70.63	7.77	10.30	Pengelolaan Data Kelitbang an dan Peraturan	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Kelitbang an	2 Dok	2,607,246,500	20,826,400	1,841,467,800	202,568,954	268,649,000					
			-	53.01	37.09	7.90	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbang an Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	1,018,759,400	-	540,000,000	377,850,000	80,475,000	Bidang Litbang - Bapelitbang Kab. Sikka				
			-	52.36	37.35	8.24	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang disusun	1 Dok	343,767,400	-	180,000,000	128,400,000	28,325,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			-	52.11	37.47	8.10	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang disusun	1 Dok	345,454,500	-	180,000,000	129,450,000	27,975,000					
			-	54.62	36.41	7.34	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang disusun	1 Dok	329,537,500	-	180,000,000	120,000,000	24,175,000					
			-	21.50	10.36	45.39	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100%	467,119,850	-	100,433,636	48,390,712	212,047,424	Bidang Litbang - Bapelitbang Kab. Sikka				
			-	21.50	10.36	45.39	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Keg	467,119,850	-	100,433,636	48,390,712	212,047,424					
			-	-	-	-	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan	-- Keg	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi	-- Keg	-	-	-	-	-					

